



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 102 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA KECAMATAN PANGATIKAN TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PANGATIKAN TAHUN 2022.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN**

#### **Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

### **Pasal 3**

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**NURDINYANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 102**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 102 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA  
KECAMATAN PANGATIKAN  
TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun

Kecamatan Pangatikan sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Pangatikan telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengembalian tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Pangatikan tahun 2022.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700 );

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816 );
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 15 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22 Seri E );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 14 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024;
20. Peraturan Bupati Garut Nomor 106 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 107 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kecamatan;
22. Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang

- Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat ( Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 11 );
23. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
  24. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 76).
  25. Keputusan Camat Pangatikan Nomor : 050/43-Kec/2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan tahun 2022 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Pangatikan guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan tahun 2022 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Pangatikan ;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

### **BAB I Pendahuluan**

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangatikan Tahun 2021**

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangatikan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut;

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pangatikan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Pangatikan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Pangatikan berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja Kecamatan Pangatikan tahun-tahun sebelumnya.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pangatikan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Pangatikan ;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pangatikan, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## 2.4 Review terhadap RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

## **BAB III Tujuan dan Sasaran.**

### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Garut;

Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Garut dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Garut dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Pangatikan

### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

#### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan.**

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

#### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PANGATIKAN TAHUN 2021**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Pangatikan Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pangatikan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pangatikan selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2020 serta perkiraan target anggaran Tahun 2022.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pangatikan Tahun 2021 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Kegiatan dan Subkegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu :
  - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Sub kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat daerah
    - Sub Kegiatan : penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    - Sub kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
    - Sub kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga
    - Sub kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    - Sub kegiatan : Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
    - Sub Kegiatan : Fasilitasi kunjungan tamu
    - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Sub Kegiatan : pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan
    - Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel
  - 6) Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
    - Sub kegiatan : penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    - Sub Kegiatan : penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
    - Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
  - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
    - Sub kegiatan : pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik
- Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yaitu :
- 1) Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - Sub Kegiatan : Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
  - 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan

- Sub kegiatan : Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
    - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      - Sub Kegiatan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa
    - 2) Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
      - Sub Kegiatan : peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
  4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - 1) Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
      - Sub Kegiatan : Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
      - Sub Kegiatan : Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
  5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu :

    - 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
      - Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
      - Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pangatikan 2020 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

### **2.1.1 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Renja 2020**

#### **1) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Pangatikan dalam pelaksanaan Renja 2020 terdapat 5 (Lima) Program dan 26 ( Dua Puluh Enam) Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG**  
**DAN BELANJA LANGSUNG**  
**KECAMATAN PANGATIKAN**  
**TAHUN 2020**

NO	KODE		KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
	Prog.	Keg.				
1	2	3	4	6	7	8
I			<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.233.028.571,-</b>	<b>1.162.240.503,-</b>	<b>94,26</b>
			<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.233.028.571,-</b>	<b>1.162.240.503,-</b>	<b>94,26</b>
II			<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>590.716.820,-</b>	<b>586.923.876,-</b>	<b>99.36</b>
	<b>01</b>		<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>194.322.820,-</b>	<b>193.036.176,-</b>	<b>99.34</b>
1		002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.400.000	10.872.836,-	95,38
2		004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Oprasional	1.553.500	1.323.500,-	85,19
3		006	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	14.321.600	14.321.600	100
4		007	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.850.000	3.850.000	100
5		008	Penyediaan Alat Tulis Kantor	37.269.700	37.269.700	100
6		009	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.804.600	26.804.600	100
7		010	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6.279.200	6.279.200	100
NO	KODE		KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
	Prog.	Keg.				
1	2	3	4	6	7	8
8		011	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.189.070	26.744.590,-	98,37
		014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.220.150	9.145.150,-	99,19
9		015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.070.000	6.060.000,-	99,84
10		017	Penyediaan Makanan dan Minuman	28.000.000	28.000.000	100
11		094	Rapat-rapat dan Pembinaan ke dalam Daerah	22.365.000	22.365.000	100

	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>292.764.000-</b>	<b>290.257.700</b>	<b>99,14</b>
12		022	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	72.000.000	69.671.700	96,77
			Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	6.864.000	6.864.000	100
13		024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	13.900.000	13.900.000	100
14		180	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	200.000.000	199.822.000	99,91
	<b>03</b>		<b>Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan</b>	<b>19.960.000</b>	<b>19.960.000</b>	<b>100</b>
15		002	Pelaporan Keuanga	9.980.000	9.980.000	100
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	9.980.000	9.980.000	100
	<b>79</b>		<b>Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan</b>	<b>67.190.000</b>	<b>67.190.000</b>	<b>100</b>
16		001	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	17.250.000	17.250.000	100
			Monitoring Proyek Pembangunan	1.130.000	1.130.000	100
			Monitoring Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT)	1.250.000	1.250.000	100
			Penyusunan RPTK Kecamatan	12.600.000	12.600.000	100
			Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara /Acara lainnya	9.480.000	9.480.000	100
17		002	Penyelenggaraan Kegiatan TP-PKK Tingkat Kecamatan	9.280.000	9.280.000	100
			Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	16.200.000	16.200.000	100
	<b>82</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)</b>	<b>16.480.000</b>	<b>16.480.000</b>	<b>100</b>
18		001	Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN)	16.480.000	16.480.000	100
<b>J U M L A H</b>				<b>1.823.745.391</b>	<b>1.749.164.379</b>	<b>95,91</b>

**2) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Pandemi Corona Disease Virus 2019 (Covid-19) menjadi faktor utama dalam lambatnya penyerapan anggaran ;
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan;
- c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

**3) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pangatikan adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pangatikan tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Pangatikan pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pangatikan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Pangatikan.

**4) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

### 2.1.2 Evaluasi Capaian Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Tahun 2020

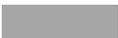
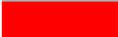
Renstra SKPD Kecamatan Pangatikan merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Pangatikan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Pangatikan yang diprogram setiap 1 (satu) tahun merupakan suatu usulan rancangan program/kegiatan yang disampaikan kepada BAPPEDA untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut yang nantinya program/kegiatan tersebut dievaluasi setiap 1 tahun anggaran.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2020, dan realisasi Renstra SKPD seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kete	
a	B	c	d	E	F	G	H	i	J	k
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82	Triwulan 1				
						Triwulan 2	82	81,18	99	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	82	81,18	99	
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>81,18</b>	<b>99</b>	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	2.1	Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	%	100	Triwulan 1	25	25	100.00	
						Triwulan 2	25	25	100.00	
						Triwulan 3	25	25	100.00	
						Triwulan 4	25	25	100.00	
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>100</b>	<b>100.00</b>	

#### Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 2 indikator kinerja Kecamatan Pangatikan tahun 2020, tidak ada indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase Desa Yang Berkinerja Baik.
3. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir kurang target 100% ada 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100 % pencapaiannya sampai 99 %.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau kurang target indikator kinerja, adalah karena indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian indikator kinerja yang mencapai target dan kurang target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau kurang dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 pada tahun ke 4 pelaksanaan Renstra Kecamatan Pangatikan Dengan tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra SKPD 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja SKPD Kecamatan Pangatikan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini :

**Tabel T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020**  
**Kabupaten Garut**

Nama SKPD : Kecamatan Pangatikan

Lembar :1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
7											
7	01										
7	01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Prosentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	99,34 %	100 %	99,34 %	99,34 %
7	01	20	01	002	Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik	100 %	95,38 %	100 %	95,38 %	95,38 %
7	01	20	01	006	Kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pembayaran STNK	100 %	85,19 %	100 %	85,19 %	85,19 %
7	01	20	01	008	Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	20	01	009	Kegiatan Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	20	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	20	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	20	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	20	01	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang memadai	100 %	98,37%	100 %	98,37%	98,37%
7	01	20	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang memadai	100 %	99,19 %	100 %	99,19 %	99,19 %

7	01	20	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Exemplar Koran/majalah	100 %	99,84 %	100 %	99,84 %	99,84 %	100 %	99,84 %	99,84 %	
7	01	20	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi oleh penyediaan makanan dan minuman	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	20	01	021	Kegiatan Rapat-Rapat dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan pembinaan kedalam daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	99,14 %	100 %	99,14 %	99,14 %	100 %	99,14 %	99,14 %	
7	01	20	02	005	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	100 %	96,77 %	100 %	96,77 %	96,77 %	100 %	96,77 %	96,77 %	96,77 %
7	01	20	02	007	Pemeliharaan rutin /Berkala Gedung Kantot	Jumlah Gedung Kantor yang memadai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	20	02	021	Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas / Operasnal	Jumlah Rumah dinas yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	20	02	022	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Gedung kantor yang memadai	100%	99,91%	100%	99,91%	99,91%	100%	99,91%	99,91%	99,91%
7	01	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
7	01	20	05	101	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kecamatan	Jumlah pegawai fungsional yang mengikuti pendidikan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
7	01	20	82		Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	20	82	019	Kegiatan Pembinaan dan monitoring pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah kolektor PBB	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	20	82	132	Kegiatan Penyusunan RPTK Kecamatan	Jumlah dokumen rencana pembangunan tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	20	82	145	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan TP PKK Tingkat kecamatan	Jumlah kader PKK yang memiliki kemampuan tingkat Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	20	82	147	Monitoring Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kecamatan	Jumlah paket pekerjaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	20	82	148	Penyelenggaraan Upacara hari Besar Nasional dan Upacara/Acara lainnya	Jumlah pelaksanaan hari-hari besar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Pangatikan sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks kepuasan masyarakat			81,18	81,18	81,25	81,35	81,40	81,18	81,18	81,18	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			80	82	84	85	90	80	82	82	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan			100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Nilai/Predikat SAKIP			CC	CC	C	B	B	CC	CC	CC	

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pangatikan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

### 1) **Pemanfaatan**

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

### 2) **Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan

kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

3) **Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat

## **2.4 Review terhadap RKPD**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangatikan serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Pangatikan

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2022 yang diusulkan Kecamatan Pangatikan sebesar Rp. 4.277.811.153,-

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Pangatikan diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan

keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2022 Kecamatan Pangatikan mengusulkan 6 (Enam) Program dengan 13 ( Tiga Belas ) Kegiatan, 31 (Tiga Puluh Satu) Sub Kegiatan
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Pangatikan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022  
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Pangatikan

Lembar 1 dari 6

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		Jenis Sub Kegiatan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>Urusan : Kewilayahan</b>						<b>8.583.482.000,00</b>							<b>5.792.379.000,00</b>		
	7.01.30.	<b>Bidang Urusan : Kecamatan Pangatikan</b>															
I	7.01.7.01.30.01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>8.192.232.000,00</b>						<b>100%</b>	<b>5.356.579.000,00</b>		Kecamatan Pangatikan
1	7.01.7.01.30.01.01.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>1 laporan</b>		<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>11.700.000,00</b>						<b>1 laporan</b>	<b>11.850.000,00</b>		Kecamatan Pangatikan
1	7.01.7.01.30.01.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	1 laporan	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90)	1 laporan	1 laporan	11.700.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU		No. 7	Aparatur di Lingkungan Kec. Pangatikan	1 laporan	11.850.000	laporan perencanaan	Kecamatan Pangatikan
2	7.01.7.01.30.01.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 laporan		1 laporan	1 laporan	<b>1.508.369.000,00</b>						1 laporan	<b>1.639.526.000,00</b>		Kecamatan Pangatikan
1	7.01.7.01.30.01.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90)	12 Bulan	12 Bulan	1.496.706.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU		No. 7	Aparatur di Lingkungan Kec. Pangatikan	12 Bulan	1.626.700.000	pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pangatikan
2	7.01.7.01.30.01.02.01.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan	1 laporan	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90)	1 laporan	1 laporan	11.663.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU		No. 7	Aparatur di Lingkungan Kec. Pangatikan	1 laporan	12.826.000	laporan keuangan	Kecamatan Pangatikan

3	7.01.7.01.30.01.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 laporan		1 laporan		11.883.000,00					0	13.071.000,00		Kecamatan Pangatikan	
1	7.01.7.01.30.01.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20 buah	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90	20 Buah	20 Buah	11.883.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU		No. 7	Aparatur di Lingkungan Kec. Pangatikan	20 Buah	13.071.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pangatikan
4	7.01.7.01.30.01.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	1 laporan		1 laporan	1 laporan	245.470.000,00					1 laporan	286.342.000,00		Kecamatan Pangatikan	
1	7.01.7.01.30.01.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90	10 Jenis	10 Jenis	5.172.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU		No. 7	Sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan Pangatikan	10 Jenis	6.113.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pangatikan
2	7.01.7.01.30.01.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37 Jenis 6 Jenis	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90	37 Jenis 6 Jenis	37 Jenis 6 Jenis	123.850.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU		No. 7	Sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan Pangatikan	37 Jenis 6 Jenis	146.368.000	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pangatikan
3	7.01.7.01.30.01.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8 Jenis	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90	8 Jenis	8 Jenis	8.298.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU		No. 7	Sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan Pangatikan	8 Jenis	9.806.000	Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Pangatikan
4	7.01.7.01.30.01.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53267 lembar	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90	53267 lembar	53267 lembar	15.980.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU		No. 7	Sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan Pangatikan	53267 lembar	18.855.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pangatikan
5	7.01.7.01.30.01.06.05.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Prundang-undangan	170 eksemplar	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90	170 eksemplar	170 eksemplar	6.770.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU		No. 7	Sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan Pangatikan	170 eksemplar	8.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Pangatikan
6	7.01.7.01.30.01.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	385 orang	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90	385 orang	385 orang	15.400.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU		No. 7	Sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan Pangatikan	385 orang	17.200.000	pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	Kecamatan Pangatikan
7	7.01.7.01.30.01.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 orang	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90	130 orang	130 orang	20.000.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU		No. 7	Sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan Pangatikan	130 orang	25.000.000	pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pangatikan

8	7.01.7.01.30.01.06.05.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pengadaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	1 paket	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90	1 paket	1 paket	50.000.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU	No. 7	Sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan Pangatikan	1 paket	55.000.000	Pengadaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Kecamatan Pangatikan
5	7.01.7.01.30.01.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 laporan		1 laporan	1 laporan	<b>6.344.000.000,00</b>					1 laporan	<b>3.322.000.000,00</b>		Kecamatan Pangatikan
1	7.01.7.01.30.01.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90	4 unit	4 unit	144.000.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU	No. 7	Sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan Pangatikan	2 unit	72.000.000	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pangatikan
2	7.01.7.01.30.01.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah item Pengadaan Mebel	1 paket	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90	1 paket	1 paket	200.000.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU	No. 7	Sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan Pangatikan	1 paket	250.000.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Pangatikan
3	7.01.7.01.30.01.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Lanjutan)	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Kecamatan Jumlah Pengadaan Tanah Alun Alaun Jumlah Pengadaan Tanah Koramil Jumlah Pengadaan Tanah Polsek	1 gedung	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 91	1 unit 280 m2 350 m2	1 unit 280 m2 350 m2 350 m2	6.000.000.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU	No. 7	Sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan Pangatikan	1 unit 280 m2 350 m2 350 m2	3.000.000.000	pengadaan tanah Alun-alun pengadaan tanah koramil pengadaan tanah polsek	Kecamatan Pangatikan
6	7.01.7.01.30.01.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan		1 laporan	1 laporan	<b>35.310.000,00</b>					1 laporan	<b>41.590.000,00</b>		Kecamatan Pangatikan
1	7.01.7.01.30.01.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan 12 bulan	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	17.580.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU	No. 7	Sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan Pangatikan	12 bulan 12 bulan	20.700.000	pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pangatikan
2	7.01.7.01.30.01.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	10 unit	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90	10 unit	10 unit	8.030.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU	No. 7	Sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan Pangatikan	10 unit	9.490.000	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	Kecamatan Pangatikan
3	7.01.7.01.30.01.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih jumlah Petugas Kebersihan	12 bulan 1 orang	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90	12 bulan 1 orang	12 bulan 1 orang	9.700.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU	No. 7	Sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan Pangatikan	12 bulan 1 orang	11.400.000	jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Pangatikan
7	7.01.7.01.30.01.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan		1 laporan	1 laporan	<b>35.500.000,00</b>					100%	<b>42.200.000,00</b>		Kecamatan Pangatikan

1	7.01.7.01.30.01.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Jumlah Service Kendaraan Jumlah suku Cadang Kendaraan	9 unit 6 unit 9 unit	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90	9 unit 6 unit 9 unit	9 unit 6 unit 9 unit	25.500.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU	No. 7	Sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan Pangatikan	9 unit 6 unit 9 unit	30.200.000	pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Pangatikan
2	7.01.7.01.30.01.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas Kantor Kecamatan	1 unit	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90	1 unit	1 unit	10.000.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU	No. 7	Sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan Pangatikan	1 unit	12.000.000	bangunan yang terpelihara	Kecamatan Pangatikan
II	7.01.7.01.30.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>218.900.000,00</b>					<b>100%</b>	<b>240.700.000,00</b>		<b>Kecamatan Pangatikan</b>
1	7.01.7.01.30.02.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	<b>188.000.000,00</b>					1 laporan	<b>206.800.000,00</b>		Kecamatan Pangatikan
1	7.01.7.01.30.02.01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Upacara Jumlah Monitoring BPNT Jumlah Monitoring PBB Jumlah Monitoring Pembangunan Jumlah Porkab Jumlah sosialisasi Covid	2 Kegiatan 8 Desa 8 Desa 8 Desa 1 Kegiatan 8 Desa	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90	2 Kegiatan 8 Desa 8 Desa 8 Desa 1 Kegiatan 8 Desa	2 Kegiatan 8 Desa 8 Desa 8 Desa 1 Kegiatan 8 Desa	188.000.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU	No. 7	Masyarakat di lingkungan Kecamatan Pangatikan	2 Kegiatan 8 Desa 8 Desa 8 Desa 1 Kegiatan 8 Desa	206.800.000	pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pangatikan
2	7.01.7.01.30.02.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<b>1 laporan</b>		<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>30.900.000,00</b>					1 laporan	<b>33.900.000,00</b>		Kecamatan Pangatikan
1	7.01.7.01.30.02.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Petugas pelayanan Kecamatan	4 Orang	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90	4 Orang	4 Orang	30.900.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU	No. 7	Masyarakat di lingkungan Kecamatan Pangatikan	4 Orang	33.900.000	jenis pelayanan	Kecamatan Pangatikan
III	7.01.7.01.30.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN</b>	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>34.900.000,00</b>					<b>100%</b>	<b>38.100.000,00</b>		<b>Kecamatan Pangatikan</b>
1	7.01.7.01.30.03.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<b>1 laporan</b>		<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>17.900.000,00</b>					1 laporan	<b>19.600.000,00</b>		Kecamatan Pangatikan

1	7.01.7.01.30.03.01.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Perencanaan Pembangunan RPTK	1 laporan	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90)	1 laporan	1 laporan	17.900.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU	No. 7	Masyarakat di lingkungan Kecamatan Pangatikan	1 laporan	19.600.000	Dokumen RPTK	Kecamatan Pangatikan
2	7.01.7.01.30.03.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<b>1 laporan</b>		<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>17.000.000,00</b>					1 laporan	<b>18.500.000,00</b>		Kecamatan Pangatikan
1	7.01.7.01.30.03.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Kader PKK	400 Orang	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90)	400 Orang	400 Orang	17.000.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU	No. 7	Masyarakat di lingkungan Kecamatan Pangatikan	400 Orang	18.500.000	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pangatikan
IV	7.01.7.01.30.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>137.450.000,00</b>					100%	<b>157.000.000,00</b>		Kecamatan Pangatikan
1	7.01.7.01.30.04.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<b>1 laporan</b>		<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>137.450.000,00</b>					1 laporan	<b>157.000.000,00</b>		Kecamatan Pangatikan
1	7.01.7.01.30.04.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembayaran Honorarium Satpol PP Jumlah Pembinaan Linmas	4 Orang 250 Orang	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90)	4 Orang 250 Orang	4 Orang 250 Orang	82.450.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU	No. 7	Aparatur di lingkungan Kecamatan Pangatikan	4 Orang 250 Orang	97.000.000	Anggota Satpol PP	Kecamatan Pangatikan
2	7.01.7.01.30.04.01.02.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah kegiatan MTQ	1 kegiatan	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90)	1 kegiatan	1 kegiatan	55.000.000,00	Kecamatan Pangatikan	Dana Transfer Umum-DAU	No. 7	Masyarakat di lingkungan Kecamatan Pangatikan	1 kegiatan	60.000.000	cabang/golongan yang diikuti	Kecamatan Pangatikan

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Pangatikan melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Pangatikan mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.32  
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2022 Berdasar OPD Kecamatan  
Pangatikan  
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Pangatikan

**BIDANG PEMERINTAHAN**

KECAMATAN : PANGATIKA  
KABUPATEN : GARUT

NO	DESA	KEGIATAN	LOKASI (Dusun RW, RT )	VOLUME	BIAYA ( Rp)			JUMLAH	KET
					APBN	APBD Prov	APBD Kab.		
1	BABAKANLOA	Pengadaan Meubeler RT dan RW	RW 01 SD 10	10 Paket			15,000,000	15,000,000	
2		Insentif Anggota Linmas	Desa	22 Paket			84,480,000	84,480,000	
3		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 3	Desa	1 Paket			15,000,000	15,000,000	
<b>JUMLAH</b>								<b>114,480,000</b>	
1	CIMARAGAS	Pembangunan Gedung POSYANDU	Desa Cimaragas	8 Unit		200,000,000		200,000,000	DPMD
2		Pembinaan Kader Dasawisma	Desa Cimaragas	10 Orang			10,000,000	10,000,000	DPMD
<b>JUMLAH</b>								<b>210,000,000</b>	
1	KARANGSARI	Gedung Poskesdes	Kp. Pangatikan Rw 02	1 Unit			√	200,000,000.00	
2		Gedung Posyandu	Dusun I,II,III Rw.2,3,4,5,6,7,8	8 Unit			√	200,000,000.00	
3		Pelatihan Kelompok Pertanian	Dusun II Rw.4,5,6	1 Paket			√	75,000,000.00	
<b>JUMLAH</b>								<b>475,000,000</b>	
1	SUKAMULYA	inventaris kendaraan BPD	Desa	9 buah			V	153,000,000	
<b>JUMLAH</b>								<b>153,000,000</b>	
1	SUKARASA	Biaya operasional PKK	Desa	1 tahun				10,000,000	
2		Biaya operasional desa	Desa	1 tahun				20,000,000	
<b>JUMLAH</b>								<b>30,000,000</b>	
1	SUKAHURIP	Pembinaan Administrasi Kader Posyandu	Desa Sukahurip	50 Orang	√	√	√	15,000,000	
2		Pembinaan Administrasi TP.PKK	Desa Sukahurip	15 Orang	√	√	√	10,000,000	
3		Pembinaan Kelompok Tani	Desa Sukahurip	17 Kelompok	√	√	√	15,000,000	
<b>JUMLAH</b>								<b>40,000,000</b>	
1	CITANGTU	Litan 1						150,000,000	
2		Permutakhiran profil Desa						250,000,000	
3		Pengadaan Perlengkapan Kantor Desa							
<b>JUMLAH</b>								<b>400,000,000</b>	
8	CIHUNI								
<b>JUMLAH</b>								<b>0</b>	
17		<b>JUMLAH</b>						<b>1,422,480,000</b>	

**BIDANG EKONOMI**

KECAMATAN : PANGATIKAN  
KABUPATEN : GARUT

NO	DESA	KEGIATAN	LOKASI (Dusun) RW, RT )	VOLUME	BIAYA ( Rp)			JUMLAH	KET
					APBN	APBD Prov	APBD Kab.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BABAKANLOA	Bantuan Modal Usaha UMKM	RW 01 SD RW 10	10 Unit			100,000,000	100,000,000	
2		Bantuan Modal UP2K TP-PKK Desa	Desa	1 Unit			50,000,000	50,000,000	
<b>JUMLAH</b>								<b>150,000,000</b>	
1	CIMARAGAS	Bantuan perkuatan Modal Perempuan	Desa Cimaragas	500 Orang			500,000,000	500,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
2		Bantuan Sarana Usaha Peternakan		10 Klp			200,000,000	200,000,000	Dinas Perikanan dan Peternakan
<b>JUMLAH</b>								<b>700,000,000</b>	
1	KARANGSARI	Budidaya Jamur	Dusun I, II, III	8 Paket			√	35,000,000.00	
2		Budidaya Ayam Bertelur	Dusun I, II, III	8 Paket			√	65,000,000.00	
3		Peternakan Domba	Dusun I, II, III	8 Paket			√	75,000,000.00	
<b>JUMLAH</b>								<b>175,000,000</b>	
1	SUKAMULYA	Permohonan bantuan benih ikan dan pakan	RW 06	1 Paket			√	150,000,000	
2		Peningkatan modal dan kapasitas KWT	RW 02.04 dan 09	3 Paket			√	60,000,000	
<b>JUMLAH</b>								<b>210,000,000</b>	
1	SUKARASA	Penanaman modal usaha	Desa	1 Paket				500,000,000	
2		Peningkatan kapasitas UMKM	Desa	1 Paket				50,000,000	
<b>JUMLAH</b>								<b>550,000,000</b>	
1	SUKAHURIP	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Blok Ciharus-Pentas	100 m	√	√	√	25,000,000	
2		Pembangunan Jalan Usaha Tani	Blok Baturahong	60 m	√	√	√	15,000,000	
3		Pembangunan Jalan Usaha Tani	Blok Pamandian	60 m	√	√	√	15,000,000	
4		Pembangunan Jalan Usaha Tani	Blok Sadahurip	80 m	√	√	√	20,000,000	
5		Pembangunan Jalan Usaha Tani	Blok Sadahurip Pojok	60 m	√	√	√	15,000,000	
6		Pengadaan Benih HOLTIKULTURA/PALAWIJA	17 Kelompok	17 Kelompok	√	√	√	350,000,000	
7		Bantuan Alat Mesin Pengolahan Kopi	1 Kelompok	1 Kelompok	√	√	√	50,000,000	
8	<b>DESA WISATA</b>	<b>TALAGA BODAS</b>	<b>Desa Sukahurip</b>	<b>Desa Sukahurip</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>300,000,000</b>	<b>PRIORITAS</b>
9		Pembentukan BUMDes	Desa Sukahurip	Desa Sukahurip	√	√	√	5,000,000	
10		Bantuan Modal BUMdes	Desa Sukahurip	Desa Sukahurip	√	√	√	100,000,000	
11		Pengadaan Pompa Air	17 Kelompok	17 Kelompok	√	√	√	35,000,000	
<b>JUMLAH</b>								<b>930,000,000</b>	
1	CITANGTU	Pelatihan Elektro	Desa	3 Klp			√	100,000,000	
2		Pelatihan Pelaku UMKM	Desa	1 Paket			√	200,000,000	
3		Modal UP2K	PKK	1 Paket			√	300,000,000	
<b>JUMLAH</b>								<b>600,000,000</b>	
1	CIHUNI								
25		<b>JUMLAH</b>						<b>3,315,000,000</b>	

**BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA**

KECAMATAN : PANGATIKAN  
KABUPATEN : GARUT

NO	DESA	KEGIATAN	LOKASI (Dusun) RW, RT )	VOLUME	BIAYA ( Rp)			JUMLAH	KET
					APBN	APBD Prov	APBD Kab.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SUKAMULYA	Renovasi PUSTU	Desa	1 tiuk			V	100,000,000	
<b>JUMLAH</b>								<b>100,000,000</b>	
1	CIMARAGAS	Rutilahu	Desa Cimaragas	100 Rumah			175,000,000	175,000,000	DISPERKIM
2		Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Dusun II dan III	1000 M			500,000,000	500,000,000	DISPERKIM
<b>JUMLAH</b>								<b>675,000,000</b>	
1	SUKARASA	Pengadaan alat-alat kursi dan tenda	rw 02	1 paket				50,000,000	
<b>JUMLAH</b>								<b>50,000,000</b>	
1	BABAKANLOA	Insentif Guru Ngaji/Madrasah Diniyah	RW 01 s.d RW 10	125			75,000,000	75,000,000	
2		Insentif Guru PAUD	RW 01 s.d RW 10	45			54,000,000	54,000,000	
<b>JUMLAH</b>								<b>129,000,000</b>	
1	KARANGSARI	Renovasi Masjid Ar Rahman	Dusun II Rw. 05 RT. 02				√	250,000,000.00	
2		Alata Calung	Dusun II Rw. 05 RT. 02				√	45,000,000	
3		Rehab Madrasah Assa'adah	Dusun I Rtw 03				√	200,000,000	
<b>JUMLAH</b>								<b>495,000,000</b>	
1	SUKAHURIP	Pengadaan Peralatan Posyandu CITRAS	Kp. Cicapar Cimaringinan RT 003 RW 001	1 Set	√	√	√	2,500,000	
2		Pengadaan Peralatan Posyandu LAVENDER	Kp. Cicapar Pasir RT 001 RW 002	1 Set	√	√	√	2,500,000	
3		Pengadaan Peralatan Posyandu BAUGENVILE	Kp. Cicapar Pasir RT 003 RW 003	1 Set	√	√	√	2,500,000	
4		Pengadaan Peralatan Posyandu DAHLIA	Kp. Cicapar Pasir RT 001 RW 004	1 Set	√	√	√	2,500,000	
5		Pengadaan Peralatan Posyandu ROSE	Kp. Cicapar Pasir RT 001 RW 005	1 Set	√	√	√	2,500,000	
6		Pengadaan Peralatan Posyandu CEMPAKA	Kp. Cicapar Pasir RT 003 RW 006	1 Set	√	√	√	2,500,000	
7		Pengadaan Peralatan Posyandu KAMBOJA	Kp. Cicapar Lebak RT 002 RW 007	1 Set	√	√	√	2,500,000	
8		Pengadaan Peralatan Posyandu TULIP	Kp. Sadahurip Kulon RT 004 RW 008	1 Set	√	√	√	2,500,000	
9		Pengadaan Peralatan Posyandu SUPLIR	Kp. Sadahurip Pojok RT 003 RW 009	1 Set	√	√	√	2,500,000	
10		Pengadaan Peralatan Posyandu MATAHARI	Kp. Cibuntu RT 002 RW 010	1 Set	√	√	√	2,500,000	
11		Insentif Guru Ngaji	Desa Sukahurip	100 Orang	√	√	√	120,000,000	
12		Insentif Guru PAUD	Desa Sukahurip	10 Orang	√	√	√	12,000,000	
13		Insentif Guru RA/TK	Desa Sukahurip	6 Orang	√	√	√	72,000,000	
<b>JUMLAH</b>								<b>229,000,000</b>	
1	CITANGTU	Rutilahu							
2		Renovasi Mesjid Arrohmah							
3		Pembangunan Aula Kampung KB							
<b>JUMLAH</b>								<b>448,000,000</b>	
1	CIHUNI	Rutilahu							
2		Pembangunan Gedung Posyandu							
3		Renovasi Mesjid							
		Penataan Pemakaman Kawao RT 09							
<b>JUMLAH</b>									
28		<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>2,126,000,000</b>	

**BIDANG INFRASTRUKTUR**

NO	DESA	KEGIATAN	LOKASI (Dusun) RW, RT )	VOLUME	BIAYA ( Rp)			JUMLAH	KET
					APBN	APBD Prov	APBD Kab.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BABAKANLOA	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 2	RW 01 SD RW 10	53 Unit		525,000,000	402,500,000	927,500,000	
2		MCK Komunal / Septiktank Komunal 3	RW 04	1 Unit			120,000,000	120,000,000	
3		Turap Penahan Tanah (TPT) Sungai Cibeureum 1	RW 03, 04	1000 M2			1,250,000,000	1,250,000,000	
<b>JUMLAH</b>						<b>525,000,000</b>	<b>1,772,500,000</b>	<b>2,297,500,000</b>	
1	CIMARAGAS	Pembangunan Bak Sampah 2	Desa Cimaragas	4X5 M2 X 10 RW			200,000,000	200,000,000	
2		Pembangunan Tembok Penahan Tanah 1	Dusun II, RW 008 dan 003	700 M			300,000,000	300,000,000	
<b>JUMLAH</b>								<b>500,000,000</b>	
1	KARANGSARI	Jalan Pertanian 1	Dusun II Rw. 05	1000 M			/	1,000,000,000.00	
2		Readymix jalan dari Rw. 03 ke Rw. 06 2	Dusun II, II Rw. 03,06	400 M			/	270,000,000.00	
3		TPT Pemakaman Umum 3	Dusun II Rw.06	300 M			/	170,000,000.00	
<b>JUMLAH</b>								<b>1,440,000,000</b>	
1	SUKAMULYA	Pembangunan Madrasah	RW 09 dan RW 13	2 Lokal				200,000,000	
2		Renovasi madrasah syiarudin	RW 02	2 Lokal				100,000,000	
3		Drainase Selokan Bangong	RW 11	200m x 1m x 0,4m				111,800,000	
4		Drainase Citra	RT 04 & RW 05	400m x 1m x 0,4m				263,550,000	
5		TPT pemukiman	RW 03	150m x 2m x 0,4m				125,000,000	
6		RKB TK Al-Fallah	Rt 01 rW 12	1 Lokal				100,000,000	
7		TPT pemukiman	Rt 02 rW 02	150m x 2m x 0,4m				209,500,000	
8		Jalan Lingkungan	RW 10	200m x 2,5m				123,850,000	
9		TPT pemukiman	RW 13	200m x 1m x 0,5m				213,249,000	
10		TPT pemukiman	RW 05	250m x 1m x 0,4m				125,000,000	
11		Drainase Parakan	RW 06	300m x 1m x 0,4m				200,000,000	
12		Peningkatan KWT	3 RW (RW.02, RW.04, RW.09)	3 Klp				150,000,000	
13		Drainase Bangong Cihura	RW 04 & RW 11	300m x 1m x 0,4m				263,550,000	
14		Pembangunan Jembatan	rw 09	50m x 3m				636,117,650	
15		Drainase jalan desa	RW 02 & RW 12	250m x 1m x 0,4m				179,490,000	
16		Rutilahu	Desa	40 Unit				600,000,000	
<b>JUMLAH</b>								<b>3,601,106,650</b>	
1	SUKARASA	Pembangunan TPT makam 2	rw 02	± 200 m				231,000,000	
2		Pembangunan Gorong-gorong 1	rw 01	± 450 m				495,000,000	
3		Pembangunan TPT 3	rw 03	± 250 m				96,250,000	
<b>JUMLAH</b>								<b>822,250,000</b>	
1	SUKAHURIP	Pembangunan TPT 2	Kp. Sadahurip Pojok RT 004 RW 009	150 m	/	/	/	135,000,000	
2		Pembangunan TPT 2	Kp. Cicapar Pasir RT 001 RW 002	350 m	/	/	/	315,000,000	
3		Pembangunan TPT 2	Kp. Sokol Pasir RT 003 RW 010	100 m	/	/	/	90,000,000	
4		Pembangunan TPT 2	Kp. Cicapar Lebak RT 002 RW 007	100 m	/	/	/	90,000,000	
5		Pembangunan TPT 2	Kp. Cicapar Lebak RT 003 RW 007	150 m	/	/	/	135,000,000	
6		Pembangunan Tanggul 2	Kp. Cicapar Pasir RT 003 RW 004	300 m	/	/	/	800,000,000	
7		Pembangunan Tanggul 3	Kp. Cicapar Paisir RT 003 RW 005	300 m	/	/	/	800,000,000	
8		Pembangunan Jembatan 4	Kp. Sadahurip Pojok RT 004 RW 009	20 m	/	/	/	30,000,000	
9		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1	Kp. Cicapar Cimaringinan	1 Unit	/	/	/	25,000,000	
10		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1	Kp. Cicapar Cimaringinan	1 Unit	/	/	/	25,000,000	
11		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1	Kp. Cicapar Pasir	1 Unit	/	/	/	25,000,000	
12		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1	Kp. Cicapar Pasir	1 Unit	/	/	/	25,000,000	
13		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1	Kp. Cicapar Pasir	1 Unit	/	/	/	25,000,000	

14		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1	Kp. Cicapar Pasir	1 Unit	/	/	/	25,000,000
15		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1	Kp. Cicapar Pasir	1 Unit	/	/	/	25,000,000
16		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1	Kp. Cicapar Pasir	1 Unit	/	/	/	25,000,000
17		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1	Kp. Cicapar Pasir	1 Unit	/	/	/	25,000,000
18		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1	Kp. Cicapar Pasir	1 Unit	/	/	/	25,000,000
19		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1	Kp. Cicapar Pasir	1 Unit	/	/	/	25,000,000
20		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1	Kp. Cicapar Pasir	1 Unit	/	/	/	25,000,000
21		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1	Kp. Cicapar Lebak	1 Unit	/	/	/	25,000,000
22		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1	Kp. Cicapar Lebak	1 Unit	/	/	/	25,000,000
23		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1	Kp. Sadahurip Kulon	1 Unit	/	/	/	25,000,000
24		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1	Kp. Sadahurip Kulon	1 Unit	/	/	/	25,000,000
25		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1	Kp. Sadahurip Pejok	1 Unit	/	/	/	25,000,000
<b>JUMLAH</b>								<b>2,820,000,000</b>
7	<b>CITANGTU</b>							
<b>JUMLAH</b>								
1	<b>CIHUNI</b>	Hotmix jalan desa	RW.01 s.d RW.03 & RW.12	321,5x2,5m & 230x2,5m				<b>500,000,000</b>
2		Rutilahu	12 RW	12 Unit				<b>180,000,000</b>
3		Penyediaan cermin cembung jalan desa	RW 03, 06,07	4 Paket				<b>20,000,000</b>
<b>JUMLAH</b>								
55	<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>525,000,000</b>	<b>1,772,500,000</b>	<b>11,480,856,650</b>

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.**

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Pangatikan guna menunjang Pembangunan Kabupaten Garut secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan iklim usaha
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan inovasi
11. Politik, hukum dan kemandirian serta ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan rakyat

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Garut sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Pangatikan di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Pangatikan yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Pangatikan telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Pangatikan mempunyai **tujuan** : *“Mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang profesional dan amanah”*

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di Tingkat Kecamatan
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2022 adalah :

1. Nilai SKM
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4. Nilai/Predikat SAKIP

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	83 point/nilai
2	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan	Nilai sinergitas kinerja kecamatan	84 nilai
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100 persen
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai/predikat SAKIP	B Nilai/predikat

### 3.3 Program dan Kegiatan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Pangatikan merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Pangatikan sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan

ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Pangatikan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Pangatikan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Pangatikan diimplentasikan untuk mencapai target – target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Pangatikan Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2022 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Pangatikan diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Pangatikan sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut.

Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan Pandai Besi, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, kerupuk Jagung, Emping Jagung, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti Puncak Kalang desa Cinta

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Pangatikan melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Pangatikan Tahun 2022 adalah 6 (enam) Program dan 12 ( Dua Belas ) Kegiatan, 31 ( Tiga Puluh Satu ) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Pangatikan sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Pangatikan dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 4.277.811.153,-.

Adapun Program Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan Kecamatan Pangatikan pada Tahun 2022 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pengadaan Mebel
  - c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
  - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya

## 2. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- a. Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan
  - a. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

  - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa
    - b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

  - 1) Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
    - a. Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan.
    - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
  - 2) Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

  - 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah
    - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    - b. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

  - 1) Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa
    - a. Fasilitasi pelaksanaan Tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
    - b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

Tabel T-C.33.  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pangatikan

lembar 1 dari 5

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target				
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>													
7	01				<b>KECAMATAN</b>													
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>													
7	01	01	2,01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100.00 %	Jumlah Dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat	10.602.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100.00 %	11.662.200,00
7	01	01	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100.00 %	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	1.360.642.063,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100.00 %	1.496.706.269,00
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100.00 %	Jumlah Dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat	10.602.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100.00 %	11.662.200,00
7	01	01	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>													

7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20 Stel 20 Stel	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100.00 %	Jumlah Pengadaan Pakain Batik Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	21.704.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100.00 %	25.748.800,00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100.00 %		Indeks Kepuasan Masyarakat	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100.00 %	11.000.000,00
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	5 Item	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100.00 %	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat	5.149.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100.00 %	5.664.340,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	39 Item	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100.00 %	Jumlah Alat Kantor Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	73.706.640,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100.00 %	81.077.304,00
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	3 Item	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100.00 %	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat	8.453.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100.00 %	9.298.850,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran /Media Massa	3 Jenis	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100.00 %	Jumlah Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	15.520.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100.00 %	17.072.000,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	175 Exemplar	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100.00 %	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	6.527.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100.00 %	7.179.700,00

7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Makanan dan Sesuai Kebutuhan Kecamatan	425 Orang	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100.00 %	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat	17.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100.00 %	18.700.000,00	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	390 Kali	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100,00%	Jumlah Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100.00 %	22.000.000,00	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>														
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	2 Unit	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100.00 %	Jumlah Pengadaan Roda 2	Indeks Kepuasan Masyarakat	129.168.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100.00 %	82.500.000,00	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Mebel sesuai Kebutuhan	44 M2	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100.00 %	Jumlah Pengadaan Meubelair	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100.00 %	97.985.349,00	
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 Unit	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100.00 %	Jumlah Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	2.027.367.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100.00 %	2.230.104.250,00	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 Unit	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100.00 %	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100.00 %	8.250.000,00	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>														
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Listrik Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100.00 %	Jumlah Pembayaran Air Kantor dan Rumah Dinas Jumlah Pembayaran Listrik Kantor dan Rumah Dinas	Indeks Kepuasan Masyarakat	17.586.060,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100.00 %	19.344.666,00	

7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	3 Jenis	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100.00 %	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	11.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100.00 %	12.265.000,00	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100.00 %	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pemberish Jumlah Petugas Kebersihan	Indeks Kepuasan Masyarakat	9.093.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100.00 %	10.002.410,00	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>														
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembayaran STNK dan Servis Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	9 Unit	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100.00 %	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Jumlah Service Kendaraan Jumlah Suku Cadang Kendaraan	Indeks Kepuasan Masyarakat	26.184.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100.00 %	28.802.400,00	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 Unit	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100.00 %	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100.00 %	11.000.000,00	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>														
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2,01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>														
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Fasilitasi Kegiatan Olahraga	207 Kali	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100.00 %	Jumlah Kegiatan Porkab Jumlah Kegiatan BPNT Jumlah kegiatan PBB Jumlah Sosialisasi Covid	Prosentase Desa yang Berkinerja Baik	73.010.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	100.00 %	80.311.000,00	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2,02</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>														
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilaksanakan di Kecamatan	1 Laporan	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100.00 %	Jumlah Petugas Pelayanan Kecamatan	Prosentase Desa yang Berkinerja Baik	67.422.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan	100.00 %	74.164.640,00	

																			n oleh Kecamatan		
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>																
7	01	03	2,01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>																
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	20 Kali	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100 %	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	Prosentase Desa yang Berkinerja Baik	5.040.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	100 %	5.544.000,00		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring/Evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Kali	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100 %	Jumlah Monitoring Pembangunan	Prosentase Desa yang Berkinerja Baik	7.522.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	100.00 %	8.274.640,00		
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>																
7	01	04	2,01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>																
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas dengan TNI/POLRI	3 Kali	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100 %	Jumlah Pembinaan LINMAS		82.463.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	90.709.740,00		
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	1 Kegiatan	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100 %	Jumlah Kegiatan MTQ		53.613.590,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	60.500.000,00		
7	01	04	2,02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>																
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>																
7	01	05	2,01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>																

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	2 Kali	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100 %	Jumlah Pelaksanaan Upacara Hari - Hari Besar	18.884.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat	100.00 %	20.772.620,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkompimca m (terkait Covid)	12 Bulan	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100 %	Jumlah Kegiatan Pimpinan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100.00 %	55.000.000,00
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>												
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>	<b>2,01</b>		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>												
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12 Kegiatan	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100 %	Jumlah Pembinaan Kader PKK	16.999.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	18.699.890,00
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen RPTK	1 Dokumen	Kab. Garut, Kec Pangatikan	100 %	Jumlah Perencanaan Pembangunan (RPTK)	16.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	18.590.000,00
<b>TOTAL</b>												<b>4.277.811.153,00</b>				<b>4.650.592.268,00</b>	

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2022 yaitu dengan melaksanakan 6 program, 12 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2022 di Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut sebesar Rp. 4.277.811.153,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

<b>1. Program Penunjang urusan pemerintah Daerah</b>	<b>Rp. 3.885.955.263</b>
1). Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp. 10.602.000
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	
Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	
Masukan : Jumlah Dana Rp. 10.602.000,-	
Keluaran : Jumlah Dokumen perencanaan	
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat	
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pangatikan	
2). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.371.244.063
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	
Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.360.642.063,-	
Keluaran : Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat	
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pangatikan	
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 10.602.000,-
Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	
Masukan : Jumlah Dana Rp. 10602.000,-	

- Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pangatikan
- 3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 31.704.000,-
- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 21.704.000,-
- Keluaran : Jumlah Pakaian dinas yang memadai
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pangatikan
- Rp. 10.000.000,-
- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi
- Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 10.000.000,-
- Keluaran : Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pangatikan
- 4). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 146.356.540,-
- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
- Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 5.149.400,-
- Keluaran : Jumlah penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan Kantor sesuai

- kebutuhan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pangatikan
- sub kegiatan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 73.706.640,-
- Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 73.706.640,-
- Keluaran : Jumlah ATK, Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pangatikan
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 8.453.500,-
- Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 8.453.500,-
- Keluaran : Jumlah Peralatan rumah Tangga sesuai Kebutuhan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pangatikan
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 15.520.000,-
- Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 15.520.000,-
- Keluaran : Jumlah cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pangatikan

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 6.527.000,-
  - Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu
  - Masukan : Jumlah Dana Rp. 6.527.000,-
  - Keluaran : Jumlah surat kabar sesuai Kebutuhan
  - Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
  - Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pangatikan
  
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp. 17.000.000
  - Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu
  - Masukan : Jumlah Dana Rp. 17.000.000,-
  - Keluaran : Jumlah Penyediaan makanan sesuai kebutuhan
  - Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
  - Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pangatikan
  
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 20.000.000
  - Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu
  - Masukan : Jumlah Dana Rp. 20.000.000,-
  - Keluaran : Jumlah Penyediaan fasilitasi perjalanan dinas dalam daerah
  - Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
  - Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pangatikan
  
- 5). Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 2.252.035.500,-
  - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 129.168.000,-
    - Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu

Masukan	:	Jumlah Dana Rp. 129.168.000,-	
Keluaran	:	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memadai	
Hasil	:	Indeks Kepuasan Masyarakat	
Sasaran Kegiatan	:	Kantor Kecamatan Pangatikan	
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel			Rp. 88.000.000,-
Capaian Program	:	Persentase Penyelenggaraan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	
Masukan	:	Jumlah Dana Rp. 88.000.000,-	
Keluaran	:	Jumlah Penyediaan mebel sesuai kebutuhan	
Hasil	:	Indeks Kepuasan Masyarakat	
Sasaran Kegiatan	:	Kantor Kecamatan Pangatikan	
- Sub Kegiatan Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya			Rp. 2.207.367.500,-
Capaian Program	:	Persentase Penyelenggaraan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	
Masukan	:	Jumlah Dana Rp. 2.207.367.500,-	
Keluaran	:	Jumlah Gedung kantor atau Bangunan lainnya Kecamatan	
Hasil	:	Indeks Kepuasan Masyarakat	
Sasaran Kegiatan	:	Kantor Kecamatan Pangatikan	
Sub Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			Rp. 7.500.000,-
Capaian Program	:	Persentase Penyelenggaraan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	
Masukan	:	Jumlah Dana Rp. 7.500.000,-	
Keluaran	:	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	
Hasil	:	Indeks Kepuasan Masyarakat	
Sasaran Kegiatan	:	Kantor Kecamatan Pangatikan	

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	37.829.160,-
Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp.	17.586.060,-
Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu		
Masukan : Jumlah Dana Rp. 17.586.060,-		
Keluaran : Jumlah Pembayaran rekening listrik sesuai kebutuhan		
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat		
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pangatikan		
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp.	11.150.000,-
Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu		
Masukan : Jumlah Dana Rp. 11.150.000,-		
Keluaran : Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan		
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat		
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pangatikan		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai Kebutuhan	Rp.	9.093.100,-
Capaian Program : Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan		
Masukan : Jumlah Dana Rp. 9.093.100,-		
Keluaran : Jumlah Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor sesuai kebutuhan		
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat		
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pangatikan		
Kegiatan Pemeliharaan barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Rp.	36.184.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas		

atau Kendaraan Dinas jabatan		Rp. 26.184.000,-
Capaian Program	: Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 26.184.000,-	
Keluaran	: Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah servis kendaraan Dinas/Operasional yang memadai	
Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat	
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Pangatikan	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		Rp. 10.000.000
Capaian Program	: Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 10.000.000,-	
Keluaran	: Jumlah gedung kantor yang memadai	
Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat	
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Pangatikan	
<b>2. Program Penyelenggaraan Pemeritahan dan Pelayanan Publik</b>		Rp. <b>140.432.400,-</b>
1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan		
- Sub Kegiatan peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Rp. 73.010.000,-
Capaian Program	: Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan di Kecamatan	
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 73.010.000,-	
Keluaran	: Jumlah pelaksanaan monitoring program bansos BPNT, Fasilitas kegiatan keagamaan, fasilitas kegiatan olah raga, kegiatan COVID	
Hasil	: Nilai SKM	

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pangatikan			
2)	Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Rp.	67.422.400,-
-	Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Rp.	67.422.400,-
Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan di Kecamatan			
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 67.422.400,-		
Keluaran	: Jumlah penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilaksanakan di Kecamatan		
Hasil	: Nilai SKM		
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pangatikan			
<b>3.</b>	<b>Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	Rp.	<b>12.562.400,-</b>
1).	Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Rp.	12.562.400,-
-	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di desa	Rp.	5.040.000,-
Capaian Program : Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan			
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 5.040.000,-		
Keluaran	: Jumlah Monitoring pelaksanaan musrenbang di tingkat Desa		
Hasil	: Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan		
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pangatikan			
-	Sub kegiatan peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Rp.	7.522.400,-
Capaian Program : Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dapat diberdayakan			
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 7.522.400,-		
Keluaran	: Jumlah pelaksanaan		

	Monitoring/Evaluasi		
	Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat		
Hasil	: Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan		
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Pangatikan		
<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban</b>		Rp.	<b>136.076.990,-</b>
<b>4. Umum</b>			
1).	Kegiatan Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	136.076.990,-
	Sub kegiatan Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Rp.	82.643.400,-
	Capaian Program : Persentase penanganan Gangguan Trantibum		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 82.463.400,-		
Keluaran	: Jumlah gangguan trantibum yang di tangani		
Hasil	: Nilai sinergitas kinerja Kecamatan		
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Pangatikan		
	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp.	53.613.590,-
	Capaian Program : Persentase penanganan Gangguan Trantibum		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 53.613.590,-		
Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama		
Hasil	: Nilai sinergitas kinerja Kecamatan		
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Pangatikan		
2).	Kegiatan koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp.	0
<b>5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>		Rp.	<b>68.884.200,-</b>
1).	Kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Rp.	68.884.200,-
	Sub Kegiatan Pembinaan wawasan Kebangsaan dan	Rp.	18.884.200,-

Ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Capaian Program : Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan Umum tingkat Kecamatan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 18.884.200,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan ( Kegiatan PHBN )

Hasil : Nilai sinergitas kinerja Kecamatan

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pangatikan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Rp. 50.000.000

Capaian Program : Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan Umum tingkat Kecamatan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 50.000.000,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan

Hasil : Nilai sinergitas kinerja Kecamatan

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pangatikan

**6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** Rp. 33.899.900,-

1) Kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa Rp. 33.899.900,-

Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Rp. 16.999.900,-

Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik

Masukan : Jumlah Dana Rp. 16.999.900,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa ( Lomba desa, Pembinaan

	desa, Monev PBB )	
Hasil	: Nilai sinergitas kinerja Kecamatan	
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Pangatikan	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Rp. 16.900.000,-
Capaian Program	: Persentase Desa Berkinerja Baik	
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 16.900.000,-	
Keluaran	: Jumlah Dokumen RPTK	
Hasil	: Nilai sinergitas kinerja Kecamatan	
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Pangatikan	
JUMLAH		Rp. 4.227.811.153,-

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Kecamatan Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ).

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Pangatikan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Pangatikan

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Pangatikan Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Pangatikan ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi **Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**